

**STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP NEGARA-NEGARA
ANGGOTA MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG) DALAM MENGHADAPI
PROPAGANDA ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM): STUDI KASUS
NEGARA REPUBLIK VANUATU**

**INDONESIA'S STRATEGY FOR MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG)
MEMBER IN FACING FREE PAPUA MOVEMENT PROPAGANDA: STUDY CASE OF
REPUBLIC VANUATU**

Gia Noor Syah Putra¹, Tri Legionosuko², Adnan Madjid³
Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan
(nspgia@gmail.com)

Abstrak - Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara dari segala ancaman asing yang ingin merusak tatanan kehidupan NKRI, salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah melakukan kontra propaganda atas propaganda yang dilakukan oleh OPM. Propaganda yang dilakukan oleh OPM mencakup empat isu-isu non-tradisional, yaitu HAM, Demokrasi, Kerusakan Lingkungan, dan Kesamaan Ras dan Latar Belakang. Isu-isu tersebut dilakukan melalui 3 jalur, yaitu media online, diskusi dan kampanye politik, dan pendekatan secara personal ke tokoh-tokoh strategis di MSG. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ini bertujuan untuk mengurai persoalan dalam strategi kontra propaganda serta bagaimana pemerintah Indonesia memelihara hubungan diplomatik dengan negara-negara anggota MSG. Metode yang digunakan ialah metodologi kualitatif deskriptif analitik, kemudian teori yang digunakan ialah teori strategi dan teori diplomasi publik. Hasil Penelitian menemukan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah konkrit. Ada 3 langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu menguatkan pembinaan teritorial oleh TNI AD di Papua, meng-counter isu-isu yang dipropagandakan oleh OPM melalui dukungan teknologi dan informasi, dan melalui jalur diplomasi. Upaya pemerintah Indonesia melakukan diplomasi terhadap negara-negara MSG, terutama Republik Vanuatu, dilakukan dengan menggunakan pendekatan diplomasi total. Dalam prakteknya Pemerintah Indonesia telah melakukan 4 upaya diplomasi, antara lain diplomasi bilateral, diplomasi budaya, diplomasi ekonomi kemaritiman, dan Bali Democracy Forum. Meskipun demikian, strategi Pemerintah Indonesia masih belum berhasil dikarenakan Indonesia minim menggunakan *non-state actor* sebagai bagian garda terdepan dalam melakukan kontra-propaganda.

Kata Kunci : *Strategi, Kontra Propaganda, OPM, MSG*

¹ Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

² Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

³ Program Studi Damai&Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

Abstract – Indonesia has a responsibility to safeguard the sovereignty of the nation and state from all foreign threats that want to undermine the order of life of the Republic of Indonesia, one way that the Indonesian government does is counter propaganda for the propaganda carried out by the OPM. Propaganda carried out by the OPM includes four non-traditional issues, namely Human Rights, Democracy, Environmental Damage, and Racial Similarities and Background. These issues are carried out through 3 paths, namely online media, political discussions and campaigns, and a personal approach to strategic figures at the MSG. Indonesia has a responsibility to safeguard the sovereignty of the nation and state from all foreign threats that want to undermine the order of life of the Republic of Indonesia, one way that the Indonesian government does is counter propaganda for the propaganda carried out by the OPM. Indonesian Government strategy aims to unravel the problem in counter-propaganda and how the Indonesian Government's strategy in dealing with Propaganda OPM towards MSG. This study uses descriptive analytical qualitative methodology, with data sources from interviews and literature. In analyzing, using strategy theory and public diplomacy theory as an analytical knife. The results of this study found that the Indonesian Government had taken several concrete steps. There are 3 steps taken by the Government of Indonesia, namely strengthening the defense posture in Papua, counteracting the issues propagated by OPM through technology and information support, and through diplomatic channels. The efforts of the Indonesian government to conduct diplomacy towards the MSG countries, especially the Republic of Vanuatu, were carried out using a total diplomacy approach. In practice the Indonesian Government has carried out 4 diplomatic efforts, including bilateral diplomacy, cultural diplomacy, maritime economic diplomacy, and the Bali Democracy Forum. Nevertheless, the Indonesian Government's strategy is still not successful because Indonesia has minimal use of non-state actors as part of the front guard in counter-propaganda.

Key Words: Strategy, Counter-Propaganda, OPM, MSG

Pendahuluan

Keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia dianggap tidak hanya sebagai sumber kekayaan namun juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Setidaknya terdapat beberapa konflik yang terjadi atas diskriminasi dan kemudian berujung akan penentuan nasib sendiri, dengan jalan pintas yaitu melakukan gerakan separatisme. Gerakan Papua Merdeka merupakan salahsatu daripada contoh dari tindakan separatisme. Adapun alasan melakukan separatisme oleh Gerakan Papua Merdeka merupakan suatu respon daripada termarginalkan suku mereka, dan

kesenjangan sosial dan ekonomi di daerah tersebut kemudian juga ditambah dengan operasi-operasi militer Pemerintah Pusat yang diperuntukkan mengatasi tindakan separatisme namun justru menimbulkan pelanggaran HAM.

Respon daripada Gerakan Papua Merdeka ini sekaligus menjadikan isu Internasionalisasi Papua yang merupakan bagian dari propaganda oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang lahir atas rekomendasi dari Kongres Rakyat Papua II. Isi dari rekomendasi itu salah satunya membentuk tim dengan tugas melobi masyarakat internasional, dan secara khusus meminta bantuan kepada negara-negara di Pasifik Selatan yang tergabung

dalam *Melanesia Spearhead Group* (MSG) dengan membentuk kantor perwakilan OPM diluar negeri, salah satunya di negara Republik Vanuatu.⁴

Propaganda kerap dilancarkan oleh suatu kelompok, golongan, organisasi, lembaga atau bahkan oleh sebuah negara sebagai sarana untuk mencapai kepentingan. Propaganda dalam penelitian ini hanya sekedar alat untuk menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain.⁵ Salah satu usaha propaganda OPM adalah dengan membuka komunikasi internasional yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mendukung papua merdeka secara bilateral terhadap negara-negara di forum regional maupun internasional, serta ikut melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) didalamnya.

Vanuatu merupakan salah satu negara-negara Pasifik Selatan yang tergabung dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG) yang mendukung kemerdekaan Papua. Pemerintahan Vanuatu secara tegas mendukung kemerdekaan Papua yang disampaikan dalam KTT Forum Pasifik Selatan di

Kiribati.⁶ Vanuatu juga mendukung resolusi PBB mengenai penentuan nasib bagi rakyat Papua dan menganggap bahwa selama ini Papua berada di bawah dominasi penjajah dan kontrol luar negeri. Kesamaan faktor-faktor sejarah dan kedekatan geografis menjadi alasan kuat bagi Vanuatu untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat.

OPM mendirikan kantor perwakilan di negara Vanuatu yang diketuai oleh Dr. John Ondowame sebagai upaya memelihara hubungan bilateral.⁷ Pemerintah Vanuatu memiliki komitmen untuk mempromosikan identitas dan hak dasar Ras Melanesia di wilayah Asia-Pasifik, khususnya bagi Papua Barat. Pemerintah Vanuatu juga mendorong dibukanya kasus-kasus ketidakadilan yang selama ini terjadi di Papua, terutama kasus HAM yang dianggap selalu ditutup-tutupi oleh pemerintah Indonesia, dan memperjuangkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua.

Pemerintahan Indonesia disini sebagai negara yang berdaulat harus mampu melakukan tindakan strategis sebagai upaya perlawanan terhadap

⁴ Adriana Elisabeth. "Dimensi Internasional Kasus Papua", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.3, No.1, 2006, Hlm. 45.

⁵ Nurudin. *Komunikasi Propaganda*, (Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya, 2001), Hlm. 10

⁶ *Op.Cit.* Hlm. 49.

⁷ Ahmad Sabir."Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua", *Jurnal Hubungan Internasional*, Tahun XI, No. 1, 2018, Hlm. 95.

propaganda yang dilakukan oleh OPM, dalam menangkalkan tindakan separatis. Hal ini dikarenakan Papua telah menjadi bagian dari wilayah Indonesia secara sah melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 2504 pada tanggal 19 November 1969, tentang status Papua yang sah menurut hukum internasional menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah harus dengan sigap melakukan tindakan-tindakan tepat sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya untuk melakukan kontra-propaganda yang dilakukan OPM, dan merangkul negara-negara dunia, terutama Vanuatu yang selalu keras menyuarakan kemerdekaan Papua di berbagai forum Internasional.

Ditinjau dari kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia, Indonesia sudah melakukan rencana dan komitmen yang ditujukan kepada pemerintahan Vanuatu yang berkaitan dengan dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat. Hal tersebut ditandai dengan memorandum saling pengertian antara Pemerintah Indonesia diwakili oleh DPR RI dan parlemen Republik Vanuatu tentang program kemitraan Antar Parlemen sebagai bentuk reaksi terhadap aksi yang digencarkan oleh Vanuatu kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 4

Maret 2014, dalam sidang Tingkat Tinggi HAM PBB ke-25. Dalam sidang tersebut Perdana Menteri Vanuatu Moana C.K Kolosil, mendesak kepada komunitas Internasional untuk mendukung kemerdekaan rakyat Papua.

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia menggunakan strategi diplomasi dengan cara menyamakan momentum MoU dengan kegiatan Internasional. Sikap demikian diambil karena dianggap efektif dari pada harus mengadakan kunjungan ke negara Vanuatu. Penyamaan kesamaan momentum MoU tersebut bersamaan dengan terselenggaranya Konferensi Parlemen Asia-Afrika di Gedung DPR RI, tepatnya pada tanggal 23 April 2015. Selanjutnya adanya pertemuan bilateral di sela-sela acara *Our Ocean Conference* (OOC) yang berlangsung pada tanggal 29 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali. Kegiatan acara ini bukan hanya komitmen untuk pelestarian laut yang dikeluarkan Indonesia, tetapi juga upaya memperkuat pengaruhnya di kawasan Pasifik. Pertemuan bilateral tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dengan Direktur Jenderal *Melanesian Spearhead Group* (MSG), Amana Yauvoli. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia menyampaikan komitmennya dalam

membantu pembangunan sumber daya manusia di negara-negara Pasifik.⁸

Dalam melihat isu gerakan OPM dan kerasnya dukungan Vanuatu tersebut maka Pemerintah Indonesia harus memerlukan strategi dalam menangkul propaganda terkait isu OPM dan juga bentuk strategi Pemerintah Indonesia yang juga tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara Anggota MSG, khususnya Vanuatu. Strategi merupakan suatu merupakan seni yang dilakukan dalam pertempuran dalam rangka memenangkan peperangan, dan untuk memenangkan peperangan tidak harus memenangkan pertempuran tapi dapat melalui hal lainnya (alternatif-alternatif menuju kemenangan).⁹

Dalam melakukan strategi ini, Pemerintah Indonesia perlu melakukan sejumlah rangkaian diplomasi. Diplomasi merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh negara dalam mendapatkan kepentingan. Kepentingan Indonesia disini ialah menjaga hubungan baik dengan negara-negara yang tergabung dalam MSG utamanya Vanuatu

yang keras terhadap dukungannya gerakan OPM. Sehingga disini Indonesia juga berperan untuk menimalisir konflik dan meredam gerakan OPM agar tidak melakukan tindakan separatisme dengan cara kontra propaganda. Dalam perspektif komunikasi internasional, propaganda kerap dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan.¹⁰ Dalam pendekatan teori kontra propaganda, urutan prioritas dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia ialah dengan negara-negara kawasan pasifik selatan, yang secara geografis berbatasan langsung dengan Indonesia. Pasifik Asia Selatan dipandang sebagai lingkaran konsentris politik luar negeri secara geografis, geostrategis, dan geopolitik baik secara politik, sosial budaya, maupun ekonomi. Hal ini justru mempunyai posisi strategi bagi upaya menjaga kedaulatan dan mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedekatan tersebut menjadi modal utama konter propaganda gerakan separatisme papua dan kampanye simpatisan mereka di beberapa negara kawasan Pasifik Selatan.

⁸ Indonesia Perkuat Pengaruh di Pasifik Lewat Our Ocean Conference, 2018, dalam <https://kumparan.com/@kumparannews/indonesia-perkuat-pengaruh-di-pasifik-lewat-our-ocean-conference-1540951052312876094>, diakses pada 16 Desember 2018.

⁹ Howart. *Clausewitz: Mahaguru Strategi Perang Modern*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafis, 1991).

¹⁰ Shoelhi, Mohammad, *Propaganda Dalam Komunikasi Internasional*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012), Hlm. 40.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, sumber data-nya terdiri dari sumber primer dan sekunder yang akan diperoleh berbentuk data narasi, deskripsi dan bukan angka. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara peneliti dengan narasumber maupun diskusi panel yang nantinya akan diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berbentuk opini subjek individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu.

Subjek penelitian adalah sesuatu baik orang, ataupun benda yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Pada subjek penelitian disini adalah para informan yang dianggap berkompetensi dan sesuai dengan permasalahan yang relevan dengan metode yang diambil. menjadi sumber data primer. Pemilihan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu dengan mengidentifikasi partisipan berdasarkan kriteria tertentu.¹¹

Subyek penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya Dirjen Strahan Kementerian Pertahanan RI, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Kodam XVII Cenderawasih Papua, LIPI, Aktifis Papua. Subjek penelitian ini merupakan data primer. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat tidak langsung dari sumbernya dimana hal ini diambil dari arsip yang dapat memberikan data tambahan yang dapat membantu peneliti seperti buku, artikel pada majalah ataupun surat kabar, dan situs internet.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen dan studi pustaka. Setelah data terkumpul dibutuhkan tahap pemeriksaan keabsahan data untuk menguji keabsahan data tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk pemeriksaan data yaitu melalui metode triangulasi data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dimana peneliti menggunakan bermacam-macam data, menggunakan lebih dari satu teori serta melibatkan beberapa narasumber.

Melalui metode ini, informasi yang didapat dari wawancara terhadap

¹¹ Wahyuni, Sari, *Qualitative Research Method: Theory and Practice*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012).

beberapa narasumber terkait judul penelitian dan nantinya akan dibandingkan dengan dokumen atau data lain yang didapatkan dari studi kepustakaan untuk menguji kebenarannya. Penelitian ini, penulis mengacu pada Miles dan Huberman terkait proses analisa data.¹²

1. Kondensasi Data

Merupakan kegiatan untuk merumuskan rangkuman, *transcribing* data yang didapat dari hasil wawancara, serta melakukan pemilihan data khususnya apa saja strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Propaganda Papua Merdeka terhadap negara-negara MSG Khususnya Vanuatu yang didapatkan dari pihak terkait. Mereduksi data ini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, untuk kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang terkumpul memberikan gambaran yang lebih jelas dan selanjutnya dapat mempermudah peneliti dalam mencari data yang diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam Penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum valid atau tidak konsisten.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Melanesian *Spearhead Group* (MSG) pada mulanya hanyalah sebuah organisasi informal saja yang didirikan di Port Vila pada 14 Maret 1988. Kemudian bertransformasi menjadi organisasi resmi

¹² Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3, (USA: Sage Publications,

Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014).

sub regional yang mewakili ras Melanesia setelah diakui oleh PBB pada 2007 yang mana anggotanya terdiri dari Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu ditambah Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (Kanak and Socialist National Liberation Front (FLNKS) atau sebuah gerakan pro kemerdekaan dari New Caledonia. Keempat negara ditambah satu organisasi pro kemerdekaan merupakan anggota penuh.

MSG sebagai organisasi sub regional Pasifik Selatan yang identik dengan ras Melanesia ini berpusat di Port Vila Vanuatu. Gedung sekretariat MSG di Vanuatu merupakan gedung yang dibangun atas bantuan Republik Rakyat Tiongkok. Sedangkan untuk operasional MSG mendapatkan dana bantuan dari Republik Rakyat Tiongkok dan EU. Sehingga seringkali MSG membahas ketergantungan tersebut agar bisa lebih mandiri lagi melalui program *Melanesian Solutions* yang membahas mengenai konsultasi hasil pendapatan negara yang akan digunakan dalam setiap operasional MSG termasuk dalam perawatan gedung sekretariat MSG.

Kedekatan letak geografis dan persamaan etnis dalam Melanesia menjadi sebab keberanian Vanuatu memberikan dukungan nyata terhadap Papua dan memboikot misi *Melanesian Spearhead Group (MSG)* ke Indonesia pada tanggal 16 Januari 2014. Negara Republik Vanuatu melalui utusannya menteri Luar Negeri Edwar Natapei menyatakan akan bersedia menjadi utusan untuk MSG apabila mendapat kesempatan bertemu dengan kelompok lokal, kelompok pro merdeka, pemimpin gereja serta kelompok lainnya yang mempunyai perhatian yang sama terhadap masalah kekerasan hak asasi manusia di Papua.

Usaha Vanuatu memberikan dukungan penuh kepada Papua untuk merdeka dari Indonesia didasari oleh dua kepentingan, yaitu:¹³

Pertama, dukungan Vanuatu yang diberikan kepada kemerdekaan Papua adalah bentuk aliansi etnik antar etnik Melanesia. Dekatnya etnis Vanuatu dan Papua menimbulkan rasa emosional antara keduanya, terutama persoalan kekerasan hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat Papua.

Kedua, berkaitan dengan keinginan Vanuatu menjadi pemimpin regional

¹³ Thomas Bagus Putera Temaluru. Kepentingan Vanuatu Dalam Usaha Pemerdekaan Papua,

Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol.5 No.2, 2016.

negara-negara melanesia dengan upaya mendukung Kemerdekaan Papua. Keinginan menjadi pemimpin regional merupakan eksistensi domestik politik Vanuatu. Kelanjutan dari dimensi politik Vanuatu merupakan usaha untuk menegakkan *Melanesia Renaissance*.

Untuk mewujudkan *Melanesia Renaissance*, maka yang dilakukan Vanuatu adalah dukungan diplomatik untuk kemerdekaan Papua melalui forum-forum regional maupun internasional. *Melanesia Renaissance* adalah ikatan untuk memperkuat kohevisitas etnis dan hubungan emosional antara Papua dan Vanuatu. Sikap reaktif yang selalu ditunjukkan Vanuatu pada setiap forum-forum adalah upaya untuk menarik perhatian secara regional maupun internasional agar supaya ikut serta membantu memberikan dukungan yang sedang dilakukan oleh Vanuatu untuk kemerdekaan Papua.

Kebijakan Politik Vanuatu dipengaruhi oleh dua aspek diantaranya aspek politik dan ekonomi.¹⁴ Aspek Politik, seperti diketahui Vanuatu adalah negara yang mempunyai instabilitas politik yang cukup tinggi. Pergantian Perdana Menteri terjadi dalam waktu yang sangat singkat

dari beberapa partai politik yang terdapat di Vanuatu.

Strategi Kontra Propaganda Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Propaganda Organisasi Papua Merdeka

Dalam melakukan strategi pemerintah Indonesia terhadap propaganda Papua disesuaikan dengan kementerian, atau lembaga terkait. Sehingga penyusunan strategi yang dimaksud harus menginterpretasikan bukan hanya jangka pendek saja namun juga berorientasi ke depan.

Strategi *Ends*, dari kontra propaganda yang dilakukan Pemerintah ini dimaksud untuk melakukan penangkalan dari propaganda OPM. Tujuan kontra propaganda tersebut adalah untuk membantah segala tuduhan dan fitnah Papua Merdeka yang telah diamanatkan kepada Indonesia terhadap negara-negara MSG dan dunia Internasional. Sehingga dapat merebut hati dan pikiran rakyat Papua. Keputusan PBB dalam Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962 dan diikuti dengan Peperatan tahun 1969 ini menghasilkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki

¹⁴ *Ibid.*

tanggungjawab penuh dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Strategi Ways, yakni ada 3 cara yang telah dilakukan oleh Kodam Papua dalam menangkal gerakan OPM. Kodam Papua menjadi otoritas pertama dan lembaga terdekat dengan organisasi tersebut. Hal ini mendukung dan aturan perumusan strategi yang menjelaskan bahwa pengaplikasian strategi dilakukan dari atas ke bawah. *Pertama*, Pembinaan Komsos. Kodam melaksanakan komunikasi sosial dengan seluruh elemen masyarakat yg ada di Papua. Dalam pelaksanaan strategi tersebut, pemerintah berusaha untuk menyentuh unsur kedekatan dengan masyarakat Papua, sehingga mereka merasa bahwa pemerintah hadir di tengah mereka.

Kedua, BINWANWIL. yakni pembinaan perlawanan wilayah. Kodam melaksanakan pelatihan kepada seluruh masyarakat Papua seperti sosialisasi wawasan kebangsaan wawasan nusantara dan bela negara secara terprogram. Pelatihan pramuka bagi anak-anak sekolah. *Ketiga*, BINBAKTITNI. Pembinaan bakti TNIAD dengan melaksanakan karya bakti dan TNI manunggal membangun desa di Papua. Kodam dan kodim bekerja sama dengan

PEMDA membangun perumahan tempat peribadatan utk masyarakat.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan beberapa program yang dilakukan oleh Kemenpolhukam atas kolaborasi beberapa kementerian-kementerian dengan fasilitas desk otsus. Program tersebut antara lain, dialog interaktif di Televisi; Dialog Interaktif di Radio; Majalah Papua; Media Online; Film tentang Papua; Berita Cetak; Forum Humas Pemerintah; Konferensi Pers; Portal *Online* Kemenkopolkukam.

Pemerintah Indonesia juga melakukan cara *soft power* yang selama ini digunakan yaitu melalui diplomasi. Ada empat diplomasi yang digunakan Pemerintah Indonesia, antara lain diplomasi bilateral, diplomasi budaya, diplomasi kemaritiman, dan *Bali Democracy Forum*. Diplomasi budaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia digunakan untuk melakukan kontra propaganda atas propaganda OPM mengenai isu-isu HAM, Demokrasi dan Kerusakan Lingkungan. *Bali Democracy Forum* yang turut mengundang negara-negara MSG digunakan Pemerintah Indonesia untuk menggambarkan demokrasi, HAM, dan upaya memberikan pengetahuan kepada dunia Internasional tentang segala upaya yang sudah

dilakukan guna mensejahterahkan rakyat Indonesia, termasuk orang asli Papua itu tersebut. Forum ini secara tidak langsung digunakan untuk menjawab tuduhan-tuduhan dan fitnah atas isu propaganda yang dilakukan oleh OPM.

Diplomasi Budaya digunakan juga oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya kontra propaganda atas propaganda OPM mengenai isu ras melanesia. Adanya diplomasi ini, Pemerintah Indonesia ingin menggambarkan bahwa bukan hanya Papua saja keturunan ras Melanesia, tetapi hampir sebagian wilayah timur Indonesia juga merupakan keturunan ras Melanesia. Selain itu, Indonesia ingin mencitrakan diri dalam diplomasi budaya ini bahwa Indonesia merupakan rumah bagi ras melanesia.

Elemen Means, dalam melakukan cara-cara *soft power* sebagai pendekatan (*ways*), Pemerintah Indonesia membutuhkan sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan (*ends*). Sarana prasarana yang digunakan Pemerintah Indonesia, antara lain *desk* Otsus, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, BIN, BAIS, dan TNI/POLRI.

Papua menjadi wilayah timur yang dapat dikatakan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal tersebut

dapat dilihat dari program pemerintah yang dikurcurkan untuk memenuhi kesejahteraan dan kenyamanan masyarakatnya. Pemerintah Indonesia melalui Kodam setempat berusaha membantu masyarakat dalam setiap kegiatan dan aktifitas seperti menyediakan sarana olahraga, kendaraan, kemudahan birokrasi dan segala hal yg bisa digunakan oleh masyarakat Papua. Semua sarana prasarana diberikan kepada masyarakat Papua guna memenangkan dan menangkal pengaruh OPM.

Semua sarana dan prasarana yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia sudah berjalan dengan baik, namun hal ini masih dianggap kurang mampu untuk menahan propaganda OPM terhadap MSG. Indikasinya adalah Republik Vanuatu yang selalu konsisten mendukung Papua Merdeka, dan membantu OPM melakukan lobi-lobi ke dunia Internasional, salah satunya adalah mempertemukan Benny Wenda ke Komisi HAM PBB.

Hal ini kemudian dikarenakan bahwa Pemerintah Indonesia dalam melakukan kontra propaganda terhadap propaganda OPM selalu menggunakan *state actor*, dan kurang menjadikan *non-state actor* menjadi bagian dalam upaya kontra propaganda yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Seharusnya Pemerintah

Indonesia lebih melakukan pendekatan kepada *non-state actor*, atau membentuk dan mendanai *non-state actor* baru sebagai penyeimbang atas propaganda yang terus dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka.

Diplomasi Pemerintah Indonesia terhadap negara-negara anggota MSG dalam isu Papua Merdeka

Hubungan diplomatik secara otomatis memperkenalkan Indonesia pada masyarakat Vanuatu melalui kehadiran perwakilan pemerintah di negara tersebut. Dalam dokumen yang menandai hubungan bilateral kedua negara, salah satu komitmen yang disepakati adalah memperkuat hubungan persahabatan antara pemerintah dan rakyat Indonesia dan Vanuatu. Selain itu, Indonesia juga berupaya meluruskan informasi dan persepsi yang dikembangkan oleh Vanuatu dalam beberapa forum internasional, yakni melalui berbagai publikasi di berbagai media milik pemerintah dan swasta, termasuk diantaranya dengan merilis laporan tentang kondisi nyata Papua yang berjudul “*No Genocide in West Papua*” pada tahun 2016.

Indonesia juga mengembangkan narasi bahwa ras Melanesia di Indonesia bukan hanya etnis Papua, tetapi juga mencakup etnis Maluku dan Nusa Tenggara Timur melalui kegiatan Festival Budaya Melanesia dan pembentukan Persaudaraan Melanesia Indonesia. Upaya pemerintah Indonesia melakukan diplomasi terhadap negara-negara MSG, terutama Republik Vanuatu, dilakukan dengan menggunakan pendekatan diplomasi total.

Dalam prakteknya Pemerintah Indonesia telah melakukan 4 upaya diplomasi, antara lain diplomasi bilateral, diplomasi budaya, diplomasi ekonomi kemaritiman, dan *Bali Democracy Forum*. Peneliti juga mengidentifikasi dalam pelaksanaannya, langkah diplomasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap negara-negara anggota MSG, terutama Republik Vanuatu masih kurang berhasil. Terdapat 3 hal yang menjadikan langkah diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia masih kurang berhasil, antara lain:

Pertama, variabel aktor yang melaksanakan diplomasi ke negara Republik Vanuatu, baik pada dimensi manajemen berita, komunikasi strategis maupun pembangunan relasi masih sangat didominasi oleh peran *state-actor*.

Sedangkan peran *non-state actor* seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan media-media nasional maupun internasional, tidak terlihat ikut berperan dalam dimensi pembangunan relasi.

Kedua, pelaksanaan ketiga dimensi diplomasi publik, yaitu manajemen berita, komunikasi strategis, dan membangun relasi tidak didukung oleh lembaga independen yang khusus untuk menganangani konflik kasus insurjensi di Papua. Hal ini menyebabkan dimensi manajemen berita dan komunikasi strategis dijalankan secara tidak terarah dan terukur, serta tidak terkordinasi dan berkesinambungan, dan target dari diplomasi ini menjadi tidak tepat sasaran.

Ketiga, diplomasi publik yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap negara-negara anggota MSG menjadi terhambat dengan adanya doktrin *Melanesian Renaissance*, sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi tidak optimal. Kuatnya doktrin *Melanesian Renaissance* ini menjadi penghambat masuknya diplomasi publik Indonesia akan dominasinya melekat dalam perpolitikan negara Republik Vanuatu.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan rekomendasi terkait, yaitu:

1. Mendirikan NGO yang diisi oleh para aktifis penggiat Papua pro NKRI, yang memiliki tugas melakukan propaganda dengan sasaran internasional untuk memperlihatkan upaya-upaya kejahatan dan fitnah yang telah dilakukan oleh OPM di dunia Internasional.
2. Mendirikan NGO yang diisi oleh para pakar cyber dengan dua tanggung jawab, yaitu mewadahi opini para penggiat Papua Pro NKRI dan juga melakukan *hacking* terhadap situs-situs Papua Merdeka.
3. Menciptakan sosok pemimpin pro NKRI asli Papua dalam upaya menyeimbangkan popularitas para petinggi OPM, salah satunya adalah Benny Wenda.
4. Merangkul negara-negara pro NKRI di MSG untuk dijadikan pemimpin di MSG.
5. Membuat modul khusus terkait diplomasi pertahanan sebagai diplomasi total pemerintah yang diberlakukan di seluruh instansi pemerintah
6. Mempublikasikan semua hal yang pernah dilakukan pemerintah untuk

Papua selama penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua dari awal tahun 2001 hingga yang terkini.

Daftar Pustaka

Buku

- Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Howart. Clausewitz. 1991. *Mahaguru Strategi Perang Modern*. Jakarta: Pustaka Utama Grafis
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Nurudin. 2001. *Komunikasi Propaganda*. Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya.
- Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- P.Anthonius Sitepu. *Studi Hubungan Internasional*. 2011. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Shoelhi, Mohammad. 2012. *Propaganda Dalam Komunikasi Internasional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Wahyuni, Sari. 2012. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat

Jurnal

- Adriana Elisabeth. 2006. Dimensi Internasional Kasus Papua. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.3, No.1
- Ahmad Sabir. 2018. Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal Hubungan Internasional*, Tahun XI, No. 1